

# KEPENTINGAN INDONESIA MENYEPAKATI *DEFENCE COOPERATION AGREEMENT* DENGAN INDIA TAHUN 2006-2012

Oleh :

**Romie Ferdian Arfie  
Faisal Rani**

**(omee.arfie@gmail.com)**

## *Abstract*

*This research describes the interest of Indonesia deal the defence cooperation agreement with India in 2006-2012. This agreement start began in 2001 when the government of Indonesia have policy to increase ALUTSISTA Indonesia military.*

*The writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the interest of Indonesia deal the defence cooperation agreement with India in 2006-2012. The theories applied in this research are strategy theory from John P. Lovvell and national interest concept from Donald. E. Nuchterlaint.*

*The research shows that the interest of Indonesia deal the defence cooperation agreement with India in 2006-2012 are to keep and increase the ALUTSISTA Indonesia military. In order the policy of government Indonesia also to protect the boundaries territorial of Indonesia .*

**Key words:** *agreement, defence, military and strategy.*

## **Pendahuluan**

Penelitian ini merupakan sebuah kajian keamanan luar negeri yang menganalisis kepentingan Indonesia menyepakati *Defence Cooperation Agreement* dengan India tahun 2006-2012. Secara khusus penelitian ini difokuskan pada hal-hal yang memotivasi pemerintah Indonesia melakukan kerjasama bidang keamanan dengan pemerintah India terutama mengenai kerjasama transfer teknologi militer Indonesia dan India yang telah disepakati sejak tahun 2001.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan hubungan diplomatik bilateral Indonesia dan India terutama mengenai motivasi dan kepentingan Indonesia melakukan kerjasama keamanan dengan India. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai bentuk kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Indonesia dan India.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku., majalah-majalah, jurnl, surat kabar, bulletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti maksud adalah antara tahun 2006-2011 pada masa rentang pelaksanaan kerjasama keamanan antara Indonesia dan India. Namun begitu batasan tahun pada penelitian ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini.

Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti. Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis.

Penulis menggunakan pendekatan realis yang mempunyai tema *Struggle for power and security*. Hubungan internasional ditandai dengan anarki, segala cara dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Morgenthau menyatakan bahwa *super power* adalah fokus utama hubungan internasional, *power* adalah alat untuk mencapai kepentingan nasional (*national interest*).<sup>1</sup> Perspektif Realis memiliki tiga asumsi dasar. Asumsi utama yaitu negara merupakan aktor utama. Dalam hal ini, hubungan internasional diidentikkan dengan hubungan antar negara berdaulat, dengan demikian faktor kewananan dilihat dalam konteks kepentingan nasional.

Asumsi kedua adalah dari pendekatan politik dan kewananan yaitu dengan cara menilai fungsi kekuasaan sebagai instrumen politik luar negeri. Asumsi ketiga adalah adanya hirarki yang jelas dari pokok-pokok permasalahan yang mendominasi politik internasional. Menurut Morgenthau, tujuan suatu Negara adalah melindungi identitas fisik negara, politik dan kulturalnya dari negara lain. Tujuan tersebut di maksudkan supaya para – para pemimpin negara mengambil keputusan di bidang kerja sama maupun konflik seperti, perlombaan senjata, perimbangan kekuasaan, pemberian bantuan asing, pembentukan aliansi atau perang ekonomi dan propaganda.

Tingkat analisa yang digunakan adalah negara bangsa (*nation state*) dengan alasan bahwa objek utama dalam hubungan internasional adalah perilaku negara bangsa, dengan asumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimanapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Tingkat analisa

---

<sup>1</sup> Hans Morgenthau. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. 1973. New York: Knopf. Hlm 25

bangsa dipakai dalam menjelaskan kebijakan yang sudah tercipta yang mewakili sebuah negara.

Tingkat analisa ini mempercayai bahwa negara adalah aktor dominan dan yang paling kuat dalam percaturan interaksi kehidupan dunia. Negara relatif bebas untuk menentukan kebijakan apa yang harus diikuti.<sup>2</sup> Maka dari itu Brazil sebagai sebuah negara yang berdaulat memperlihatkan kemampuan dan hasil dari kegiatan itu.

Analisa manuver diplomatik dan tindakan-tindakan diplomatik negara lain dapat dilihat sebagai akibat dari tekanan-tekanan politik, ideologi, opini publik atau kebutuhan ekonomi dan sosial dalam negeri.<sup>3</sup> Kondisi dalam negeri menentukan strategi yang akan digunakan melalui jalur diplomasi. Menggunakan tingkat analisa negara bangsa dengan menitikberatkan pembahasan pada strategi Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dengan India tahun 2012.

Level analisa berasal dari anggapan bahwa perilaku setiap negara sebenarnya bergantung pada perilaku negara lainnya dalam sebuah sistem internasional. Untuk menerangkan sistem yang abstrak ini bisa dipakai analogi yang lebih sederhana yaitu sistem sirkulasi tubuh manusia, yang terdiri dari nadi, arteri, organ dan sel - sel yang secara keseluruhan harus bekerja dan berfungsi secara baik untuk kelancaran dalam sistem dan akhirnya menghasilkan tubuh yang sehat dan performa yang baik. Demikian juga dunia internasional, ia juga memiliki sub sistem yang saling berkaitan satu sama lain.<sup>4</sup>

Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional yang digunakan oleh Donald E. Nuchterlain. Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.<sup>5</sup> Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional yang dirumuskan oleh Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu:

1. *Defense Interest*: Kepentingan untuk melindungi negara atau rakyat dari ancaman fisik dari negara lain atau perlindungan ancaman terhadap sistem suatu negara.
2. *Economic Interest*: Kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai secara ekonomi dalam hubungannya dengan negara lain dimana hubungan perdagangan yang dilakukan dengan negara lain akan memberikan keuntungan.
3. *World Order Interest*: Kepentingan tata dunia dengan adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana

---

<sup>2</sup> Theodore A. Coloumbis & James E Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan power*, Bandung: Putra Abardin, 1990, hal 127

<sup>3</sup> Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta. 1990. Hlm 45

<sup>4</sup> K J. Holsti. *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*. 1992. Bandung: Binacipta. Hlm. 16

<sup>5</sup> Donald E. Nucterlain. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979, hlm 57

suatu negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat beroperasi diluar batas negara dengan aman.

4. *Ideological Interest*: Kepentingan ideologi dengan perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu negara yang berdaulat.<sup>6</sup>

Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, maka strategi Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dengan India tahun 2012 adalah bentuk kepentingan keamanan dan ekonomi bagi Indonesia. Berdasarkan kepentingan ekonomi maka kepentingan Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dengan India adalah untuk meningkatkan keamanan Indonesia melalui peningkatan alutsista militer Indonesia, sedangkan kepentingan ekonomi adalah dengan melakukan kerjasama pertahanan dengan India maka Indonesia mendapatkan nilai transaksi perdagangan alutsista yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain.

Penelitian ini difokuskan pada kajian strategi keamanan dengan menggunakan teori pergeseran strategi oleh John P. Lovell. Strategi menurut John Lovell adalah serangkaian langkah-langkah (*moves*) atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan.

Selain pengertian strategi, maka keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan diri (*survival*) dalam menghadapi ancaman yang nyata (*existensial threat*) yang berasal dari pihak lain. Dalam hal ini kemampuan sebuah negara mengantisipasi terjadinya ancaman dan serangan dari negara lainnya.

Strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau kepentingan dengan menggunakan power yang tersedia, termasuk juga kekuatan militer. Dalam perancangan strategi tidak didasarkan pada pertimbangan moral, keyakinan, atau hal-hal emosional, tetapi didasarkan pada rasionalitas para perancang strategi atau para pembuat keputusan. Selain itu, pengertian strategi menurut Craig Snyder adalah:

*Strategy is the art of mobilizing and directing the total resources of a nation or community of nations, including the armed forces to safeguard and promote its interest against its enemies, actual or potential.*

Strategi yang telah dirancang tersebut akan menjadi pedoman bagi para pembuat kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional. Secara analitis, terdapat dua komponen strategi yaitu komponen ofensif yang merupakan bentuk untuk mendapatkan perolehan dan keuntungan, dan komponen defensif yaitu bentuk untuk mencegah kerugian-kerugian.

Teuku May Rudy merumuskan tentang dua komponen strategi yaitu komponen defensif (strategi untuk mencegah kerugian-kerugian) dan komponen ofensif (strategi untuk mendapatkan perolehan atau keuntungan). Pada tahap

---

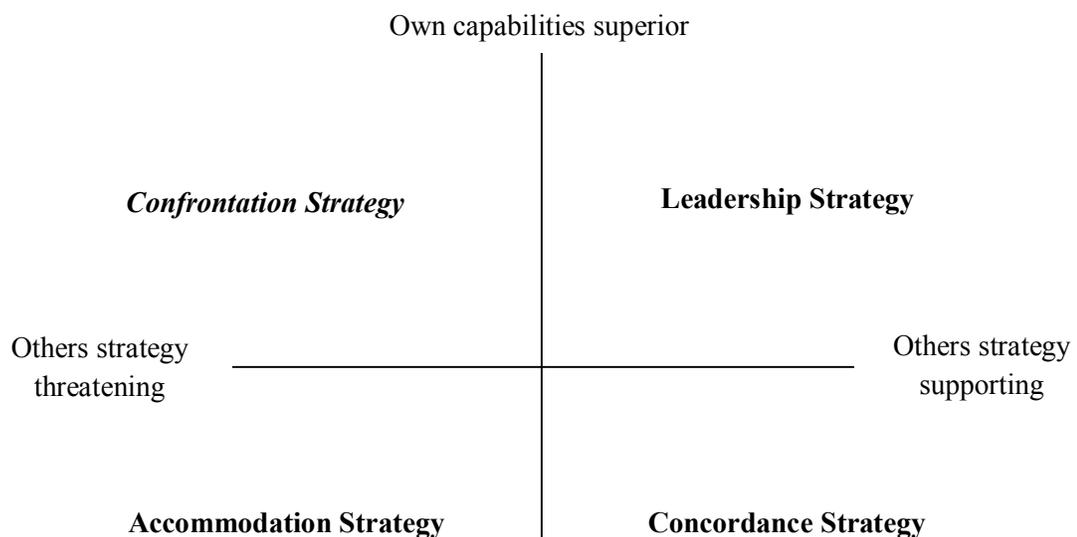
<sup>6</sup> *Ibid.*

perumusan strategi politik luar negeri yang akan diterapkan dalam interaksi dengan negara (aktor) lainnya, ada beberapa variabel kunci yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Variabel penilaian oleh para pembuat kebijakan mengenai tindakan negara (aktor) lainnya.
2. Variabel penilaian kapabilitas (kekuatan) nasionalnya.<sup>7</sup>

Lovell menggambarkan tentang pola pembentukan dan pergeseran strategi suatu negara yang didasarkan pada dua variabel diatas. Dari gambaran Lovell tentang perumusan strategi, dapat dianalisa mengenai strategi dan posisi Indonesia dalam menghadapi konflik dan sengketa perbatasan dengan Malaysia. Berikut ini merupakan gambaran pemikiran Lovell:

**Gambar 1. Pola dan Pergeseran Strategi**



Sumber: Lovell, 1970 hal 99.

Berdasarkan pola pemikiran strategi diatas, maka pilihan strategi Indonesia melakukan kerjasama pert Own capabilities inferior lah dikategorikan sebagai penggunaan strategi *concordance strategy*. Hal ini dikarenakan Indonesia dan India memiliki hubungan yang cukup harmonis sehingga saling mendukung. Oleh karena itu terhadap India, Indonesia menggunakan strategi kerjasama, khususnya dibidang pertahanan dan militer.

### **Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Permasalahan militer dan pertahanan sampai saat ini masih menjadi fokus utama dalam kajian ilmu hubungan internasional. perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi

<sup>7</sup> Teuku May Rudy, *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa. 1993. Hal 65.

mendorong masyarakat internasional untuk saling meningkatkan hubungan di segala bidang, dengan menjalin kerja sama antar negara, baik bilateral maupun multilateral.

Dalam hal ini, setiap negara harus berupaya untuk memperkuat kondisi Alutsistanya baik melalui kerjasama bilateral dan multilateral.<sup>8</sup> Di Indonesia alutsista yang dimiliki TNI banyak yang sudah tidak layak lagi, kebanyakan adalah karena faktor usia. Jika dibandingkan dengan alutsista yang dimiliki negara-negara tetangga, kemampuan dan kelengkapan alutsista TNI masih di bawah mereka. Untuk menghadapi kondisi tersebut, dibentuklah High Level Committee (HLC) sebagai pendorong pengadaan alutsista TNI. Indonesia sudah lama tidak punya satuan roket seperti digunakan Brasil. Pembelian (roket) dari Avibras ini untuk melengkapi alutsista kita.<sup>9</sup>

Kondisi alat utama sistem senjata TNI Angkatan Darat masih jauh dari kondisi ketercukupan. Saat ini kemampuan pertahanan TNI AD antara lain bertumpu pada kendaraan tempur (Ranpur) berbagai jenis dengan kondisi siap hanya sekitar 60% dan pesawat terbang dengan kondisi siap hanya sekitar 50%. Kebutuhan alat komunikasi yang merupakan pendukung utama kemampuan pertahanan TNI AD juga belum dapat terpenuhi dan masih mempergunakan teknologi yang rawan penyadapan.<sup>10</sup> Sehingga hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan India terkait dengan latihan militer bersama dan transfer teknologi terhadap operasional persenjataan yang baru seperti sukhoi, dll.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi pertahanan yang komprehensif selama 5 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan kebijakan dan strategi pertahanan berupa dokumen *Strategic Defense Review* (SDR), strategi pertahanan raya, dan postur pertahanan sebagai dasar pembangunan kekuatan pertahanan negara.<sup>11</sup>

Sehingga dengan pertahanan dan keamanan negara yang cukup kuat baik dari segi strategi dan kekuatan persenjataan dapat mendukung terciptanya stabilitas dan profesionalitas TNI yang memiliki tugas untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia dari ancaman domestik dan dalam negeri.

Disisi lain saat ini India adalah importir terbesar senjata militer, dengan pengeluaran setara dengan 9 persen dari impor dunia dalam bidang persenjataan. Sumber senjata utama mereka adalah senjata Rusia, Israel, dan Perancis. India memelihara hubungan dekat dengan Rusia, terutama dalam hal pengembangan pesawat militer. Pemerintah India semakin serius meningkatkan kemampuan militer

---

<sup>8</sup> [http://analisisalutsista.com/kekuatan militer Indonesia](http://analisisalutsista.com/kekuatan%20militer%20Indonesia). Diakses pada tanggal 5 Juli 2012.

<sup>9</sup> <http://www.artileri.org/2012/11/percepat-modernisasi-alutsista-dengan-hlc.html>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2013.

<sup>10</sup> Tim LESPERSSI. 2007. *Borders and Security Governance: Managing Borders in Globalised World*. Jakarta: LESPERSSI.

<sup>11</sup> Buku Pertahanan Presiden Republik Indonesia. Bab 7 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara. Tahun 2009. Bagian 2. Hlm 1

guna meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional. Negara di Asia Selatan ini telah menjadi pengimpor senjata militer terbesar dunia, mengalahkan Cina.

Berdasarkan laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), lembaga riset internasional mengenai konflik, dan persenjataan yang berdiri sejak 1966, India berada di atas dengan sembilan persen total impor senjata global selama empat tahun sejak 2006. India sedang menuju kekuatan militer baru dunia. Nilai impor senjata India mengalahkan Cina yang memasok enam persen senjata dari total impor global.

Analisis lembaga yang berbasis di Swedia menyebutkan impor senjata negara Asia Selatan ini meningkatkan kekuatan militer menandingi kekuatan militer Cina. "India mempunyai ambisi menjadi negara utama di benua Asia dan (lalu) kekuatan regional," kata pengamat Asia Selatan dari Jane's Defense, Rahul Bedi, di London. "Untuk menjadi besar, Anda harus memproyeksikan kekuatanmu."

Sembilan persen dari total impor senjata selama empat tahun merupakan pembelian tertinggi dalam beberapa waktu ke depan. "Dari apa yang mereka telah pesan saja, kita tahu dalam beberapa tahun ke depan, India menjadi importir terbesar," kata analisis senior SIPRI, Siemon T. Wezeman. Juru bicara Menteri Pertahanan India, Sitanshu Kar, menolak berkomentar dari laporan itu.

Masih berdasarkan laporan tersebut, Amerika Serikat menjadi pengeksport senjata terbesar di dunia, di atas Rusia dan Jerman. Investasi India berada di tengah meningkatnya kekhawatiran kekuatan Cina. India menyiapkan senjata untuk mengamankan jalur laut Samudera Hindia. Investasi India yang mencapai miliaran dollar ini dipakai untuk mendatangkan pesawat jet tempur dan kapal induk jenis carrier. Ini akan meningkatkan kemampuan tempur angkatan udara dan angkatan lautnya.

Hubungan India masih kurang harmonis dengan Cina dan Pakistan. India dan Cina pernah berebut perbatasan saat perang 1962. Begitupula masalah perbatasan dengan Pakistan. India berusaha meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional, termasuk dengan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. India menganggarkan biaya pertahanan US\$ 32,5 miliar pada tahun ini. Naik 40 persen dari dua tahun sebelumnya. Sekitar 70 persen diantaranya dipakai untuk mendatangkan persenjataan. India memasok persenjataan dari Rusia, sekitar 82 persen. Namun, negara pengeksport lainnya mulai mendekati India.

Dalam kunjungannya bulan Juli ke India, Perdana Menteri Inggris, David Cameron mengadakan kerja sama senilai hampir US\$ 1,1 miliar, untuk membeli 57 pesawat jet tipe Hawk. Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dalam kunjungan November lalu, menjalin kerja sama US\$ 4,1 miliar untuk sepuluh pesawat pengangkut tipe C-17.

Perancis dan India sudah hampir menyelesaikan kerja sama senilai US\$ 2,1 miliar untuk pesawat jet tempur Mirage 2000, saat Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy berkunjung Desember lalu. Beberapa pekan kemudian India dan Rusia resmi

berkejasama dalam pengembangan generasi kelima sektor jet tempur. Kerja sama dilakukan saat kunjungan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev.

India masih menunggu kapal laut jenis carrier yang diperbaharui bernilai US\$ 2,3 miliar, dan memesan enam kapal selam seharga US\$ 4,5 miliar dari Perancis. India diperkirakan mengeluarkan US\$ 80 miliar dalam sepuluh tahun nanti untuk meningkatkan senjata militernya itu. Menurut Wezeman, India akan membeli 126 jet tempur senilai US\$ 11 miliar, dan sekitar 200 helikopter senilai US\$ 4 miliar. Kapal karier amfibi senilai US\$ 300 juta sampai US\$ 500 juta per kapal, dan sedang berdiskusi memesan kapal selam bernilai US\$ 10 miliar.<sup>12</sup> Hal ini diakibatkan karena India memandang tingkat keamanan negara dalam status waspada karena persaingan negara dengan Pakistan dan ketegangan perbatasan dengan negara Cina.<sup>13</sup>

Hal ini juga yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan perkembangan alutsista di negaranya maupun internasional karena dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri memperkuat suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan Ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, kerja sama internasional melalui berbagai bentuk perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, antara lain, kerja sama di bidang pertahanan merupakan suatu hal yang perlu ditingkatkan.

Peningkatan kemampuan pertahanan negara memerlukan kerja sama bilateral antar negara sahabat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, dan penghormatan penuh atas kedaulatan setiap negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Republik India di bidang pertahanan melalui persetujuan bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2001 yang pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang.

Disini kita lihat bahwa antara kekuatan pertahanan dan militer Indonesia dan India dapat dinyatakan bahwa India jauh lebih maju dari pada kekuatan pertahanan militer alutsista Indonesia. Beberapa bagian penting dalam persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India adalah :<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2011/03/14/118319865/India-Perkuat-Senjata-Militer>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2012.

<sup>13</sup> <http://tradisional.blogspot.com/2013/03/10-negara-dengan-jumlah-prajurit.html>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2013.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan

1. Kerja sama antara kedua badan pertahanan yang meliputi peningkatan di bidang bantuan produksi dan pelayanan, proyek yang berhubungan dengan peralatan dan komponen pertahanan, kerja sama industri pertahanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, serta kemampuan operasi, latihan bersama, dan logistik di bidang pertahanan.
2. Pembentukan Komite Bersama yang bertugas, meliputi :
  - a. Mengkaji dan mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama yang potensial;
  - b. Mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kepentingan bersama;
  - c. Memprakarsai dan mengusulkan kegiatan-kegiatan kerja sama;
  - d. Mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang telah disetujui;
  - e. Mengusulkan pengaturan pelaksanaan apabila diperlukan;
  - f. Memecahkan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan persetujuan ini;
  - g. Menyerahkan laporan bersama pada setiap akhir pertemuan kepada Menteri Pertahanan masing-masing.
3. Para pihak wajib melindungi hak kekayaan intelektual dari penggunaan dan personel yang tidak berwenang.
4. Para pihak wajib melindungi informasi yang diklasifikasikan dan peralatan yang diperoleh atau yang muncul berdasarkan persetujuan ini.
5. Informasi yang diklasifikasikan dan peralatan hanya dapat diberikan melalui saluran resmi atau saluran lain yang disetujui oleh para Ketua Komite Bersama.
6. Semua informasi dan peralatan yang berkaitan dengan implementasi persetujuan kerja sama ini tidak dapat diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemberi.

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dilaksanakan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. Motivasi India melakukan kerjasama pertahanan dengan India tentu saja didorong oleh keinginan India untuk meningkatkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Menteri Pertahanan (Menhan) India A. K. Antony bertemu dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Indonesia Purnomo Yusgiantoro ketika berkunjung ke Jakarta baru-baru ini. Antony menggambarkan pertemuan itu “sebuah titik balik” dan “awal yang sangat bagus” bagi kedua negara.

Dialog pertahanan dua tahunan yang pertama di tingkat menteri antara Indonesia dan India disepakati saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi India pada bulan Januari tahun lalu. Hubungan pertahanan antara India dan Indonesia mengalami kemajuan sejak kedua negara menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan pada tahun 2001. Di bawah kesepakatan kerja sama, India setuju untuk melatih pilot tempur Indonesia tentang jet tempur Sukhoi, selain

membantu TNI-AU mengoperasikan armada Sukhoi, yang mencakup jet tempur Su-27 dan Su-30. Selain itu, Setelah keberhasilan latihan gabungan AD yang pertama kali dalam hal kontraterorisme dan perang hutan di India pada tahun 2012, Antony juga mengusulkan agar kedua negara melanjutkan latihan gabungan AD dengan tingkat frekuensi yang disepakati bersama.<sup>15</sup>

Dengan kesepakatan resmi berbagi informasi ranah maritim antara kedua AL, kata Antony, kedua belah pihak dapat mempertimbangkan kemungkinan meningkatkan pelibatan dengan latihan gabungan AL. AL India dan TNI-AL secara rutin melakukan patroli terkoordinasi maritim dan menjalankan patroli di sepanjang Garis Batas Maritim Internasional secara teratur.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan Indonesia menyepakati *defence cooperation agreement* India karena untuk meningkatkan kekuatan alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia.

Permasalahan mendasar dalam meningkatkan profesionalisme anggota TNI adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai, medan dan fasilitas latihan yang terbatas, alat instruksi dan alat penolong instruksi yang relatif kedaluwarsa, serta peralatan pendidikan dan latihan yang juga terbatas. Selain itu, masalah kesejahteraan prajurit dan belum tersiapkannya potensi dukungan pertahanan seperti rakyat terlatih dalam jumlah yang cukup merupakan permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kemampuan pertahanan selama 5 tahun mendatang.

Selain itu ketidaksesuaian antara kebutuhan peralatan pertahanan negara serta kemampuan teknis dan finansial industri nasional di sisi lain merupakan salah satu penyebab terjadinya ketertinggalan peralatan pertahanan dan ketergantungan terhadap negara lain juga menjadi pendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama keamanan dan pertahanan dengan negara lain seperti Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan India dibidang kerjasama militer angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Di bawah kesepakatan kerja sama, India setuju untuk melatih pilot tempur Indonesia tentang jet tempur Sukhoi, selain membantu TNI-AU mengoperasikan armada Sukhoi, yang mencakup jet tempur Su-27 dan Su-30. India memiliki perjanjian serupa dengan Malaysia untuk mengoperasikan jet tempur Sukhoi. Setelah keberhasilan latihan gabungan AD yang pertama kali dalam hal kontraterorisme dan perang hutan di India pada tahun 2012.

---

<sup>15</sup> Defense Kumar. 2011. *India dan Indonesia Perkuat Kerjasama Pertahanan*. Journal of Asia Pasific Defense Forum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Colombis Theodore A & Wolfe James E, 1990. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan power*, Bandung: Putra Abardin.
- Holsti K J. 1992. *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Binacipta.
- Mohtar Mas'ued. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta.
- Morgenthau Hans. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. 1973. New York: Knopf.
- Nucterlain Donald E. 1979. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring).
- Teuku May Rudy, 1993. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa.
- Tim LESPERSI. 2007. *Borders and Security Governance: Managing Borders in Globalised World* . Jakarta: LESPERSI.

### **Jurnal dan Peraturan Perundang-undangan**

- Buku Pertahanan Presiden Republik Indonesia. Bab 7 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara. Tahun 2009. Bagian 2.
- Defense Kumar. 2011. *India dan Indonesia Perkuat Kerjasama Pertahanan*. Journal of Asia Pasific Defense Forum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan

### **Website**

- [http://analisisalutsista.com/kekuatan militer Indonesia](http://analisisalutsista.com/kekuatan_militer_Indonesia). Diakses pada tanggal 5 Juli 2012.
- <http://www.tempo.co/read/news/2011/03/14/118319865/India-Perkuat-Senjata-Militer>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2012.

<http://www.artileri.org/2012/11/percepat-modernisasi-alutsista-dengan-hlc.html>.  
Diakses pada tanggal 4 Februari 2013.

<http://tradizional.blogspot.com/2013/03/10-negara-dengan-jumlah-prajurit.html>.  
Diakses pada tanggal 6 Februari 2013.